

ANALISIS *UNIT COST* BERDASARKAN MODEL *ACTIVITY BASED COSTING* SISWA SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017

Fadlia Azka Zhorifa Saifuddin

*Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
fazsddn@gmail.com*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya *unit cost* pendidikan per siswa per tingkat per paket keahlian SMK Negeri 4 Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 dengan menggunakan model *Activity Based Costing*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif menggunakan program excel. Hasil penelitian menunjukkan besarnya *unit cost* pendidikan per siswa per tingkat per paket keahlian per bulan yang dihitung menggunakan *Activity Based Costing* secara berturut-turut untuk setiap tingkat adalah sebagai berikut: 1) Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan Rp1.178.846, Rp1.190.485, Rp986.912. 2) Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata Rp1.178.846, Rp1.176.518, Rp1.009.305. 3) Paket Keahlian Tata Boga Rp1.127.163, Rp1.098.868, Rp890.101. 4) Paket Keahlian Pateseri Rp1.204.587, Rp1.204.918, Rp1.161.964. 5) Paket Keahlian Kecantikan Kulit Rp1.191.512, Rp1.204.918, Rp1.059.068. 6) Paket Keahlian Kecantikan Rambut Rp1.191.512, Rp1.381.002, Rp1.149.263. 7) Paket Keahlian Tata Busana Rp1.109.672, Rp1.137.911, Rp908.369.

Kata kunci: Biaya Satuan Pendidikan, *Activity Based Costing*

A UNIT COST ANALYSIS BASED ON THE ACTIVITY BASED COSTING MODEL FOR STUDENTS OF SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA IN THE 2016/2017 ACADEMIC YEAR

Abstract: This study aimed to find out the unit cost of education per student per level per expertise program at SMK Negeri 4 Yogyakarta in the 2016/2017 academic year using the *Activity Based Costing* model. The study used the quantitative descriptive method. The data were collected through documentation and interviews. They were analyzed by descriptive statistics using the excel program. The results of the study showed that the unit costs of education per student per level per expertise program per month calculated using the *Activity Based Costing* method for each level were respectively as follows: 1) Expertise Program of Accommodation and Hotel: Rp1.178.846, Rp1.190.485, Rp986.912; 2) Expertise Program of Travel Agent: Rp1.178.846, Rp1.176.518, Rp1.009.305; 3) Expertise Program of Culinary Art: Rp1.127.163, Rp1.098.868, Rp890.101; 4) Expertise Program of Patisserie Rp1.204.587, Rp1.204.918, Rp1.161.964; 5) Expertise Program of Skin Beauty: Rp1.191.512, Rp1.204.918, Rp1.059.068; 6) Expertise Program of Hair Beauty: Rp1.191.512, Rp1.381.002, Rp1.149.263; and 7) Expertise Program of Fashion Design: Rp1.109.672, Rp1.137.911, Rp908.369.

Keywords: Unit Cost of Education, *Activity Based Costing*

PENDAHULUAN

Melihat suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dijalankan, pemerintah mulai tahun 2013 melanjutkan program wajib belajar ke jenjang pendidikan

menengah- Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan yang sederajat, sehingga menjadi program wajib belajar dua belas tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, 2012). Dengan program wajib belajar 12 tahun tersebut, semua penduduk usia sekolah 6 sampai dengan 12 tahun akan mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah (SMA, SMK, dan yang sederajat). Dengan harapan agar kualitas hasil anak didik dapat lebih baik.

Salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan adalah kesiapan pemerintah untuk mengantisipasi pendanaan yang diperlukan. Dengan terbentuknya program ini, muncul kebutuhan untuk menyediakan sumber daya pendidikan menengah atas di satuan pendidikan dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang membawa implikasi pada biaya. Seluruh biaya tersebut perlu dihitung sehingga dapat diperkirakan kebutuhan dana untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 tahun tersebut.

Pembiayaan pendidikan (*financing education*) sendiri merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan pendidikan di hampir semua negara di dunia ini. Salah satu faktor yang menyebabkan mutu pendidikan Indonesia kurang mengalami peningkatan ialah peran serta masyarakat dalam pendidikan sangat minim. Partisipasi mereka lebih banyak berupa dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, atau monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas (Depdiknas, 2001).

Namun, standar pembiayaan dalam Permen No 9 Tahun 2009 sampai saat ini belum pernah disesuaikan, membuat kajian pembiayaan ini sangat penting dalam rangka mempersiapkan pendanaan program Wajib Dikmen 12 tahun. Terlebih dengan diberlakukannya kurikulum baru 2013 yang merubah kegiatan pendidikan. Untuk itu pemerintah perlu segera merencanakan kebutuhan biaya pendidikan di tingkat SMA/SMK/MA dan yang sederajat, dimana standar biaya sangat perlu dirumuskan kembali dengan model pembiayaan berdasarkan kegiatan (*activity based costing*).

Persoalan pembiayaan pendidikan sekarang bukan lagi “siapakah yang harus dan tidak harus mendapatkan prioritas dalam pembiayaan pendidikan”, tetapi “dalam jumlah berapa kelompok murid/sekolah tertentu mendapatkan alokasi dana, dalam jumlah berapa pula untuk kelompok murid yang lain dan apa kriterianya?” (Caldwell, et.al, dalam Supriadi, 2004)

Untuk merencanakan kebutuhan biaya pendidikan, pemerintah membutuhkan informasi faktual terkait dengan biaya pendidikan tiap sekolah maupun tiap siswa yang disebut dengan biaya satuan pendidikan (*unit cost*). Analisis dalam bentuk biaya satuan pendidikan atau *unit cost analysis* sangat penting bagi perencana pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan analisis biaya satuan dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan sumber-sumber di sekolah, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat maupun pemerintah untuk pendidikan. Dan dapat pula digunakan sebagai bahan penilaian untuk pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan atau peningkatan sistem pendidikan.

Selain pemerintah, lembaga pendidikan atau sekolah juga sangat memerlukan informasi biaya pendidikan. Tanpa informasi biaya, pihak manajemen sekolah tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomis yang lebih rendah daripada nilai keluarannya. Tanpa informasi biaya, tidak akan dapat diketahui akurasi pada penerapan biaya penyelenggara pendidikan tersebut apakah terlalu mahal atau terlalu murah. Selain itu, pihak manajemen sekolah tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan berbagai sumber ekonomi yang dikorbankan dalam menghasilkan sumber ekonomi yang lain.

Dalam Sejarah Pendidikan Kejuruan di Indonesia (2002: 586) disebutkan jika Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang sejahtera. Di samping sumber daya alamnya yang kaya, Indonesia memiliki tenaga kerja dalam jumlah yang berlimpah. Agar potensi tersebut dapat menjadi sumber daya pembangunan, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan. Begitu pula dengan Diklat kejuruan dituntut untuk mampu meningkatkan kompetensi generasi muda Indonesia yang akan memasuki dunia kerja, melatih ulang dan meningkatkan kompetensi mereka yang sudah bekerja, selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar kerja.

Sejalan dengan itu, pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Karena sumber daya Indonesia yang paling berharga adalah keterampilan dan keahlian bangsanya.

SMK atau pendidikan kejuruan menjadi lahan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan nilai tambah untuk memasuki dunia kerja dan melatih-ulang serta meningkatkan keterampilan dan keahlian bagi mereka yang sudah bekerja agar tetap selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar, yang jika tidak disiapkan akan membuat bonus demografi di Indonesia dapat berakibat kurang baik pada SDM Indonesia yang tertinggal dalam kompetensi dan kompetisi. Hal ini dikarenakan tercatat kondisi pada tahun 2016 tenaga kerja berasal dari 42,5% lulusan SD, 66% lulusan SD dan SMP, dan 82% SMP dan SMA (Konten Kemendikbud, 2017) Perbaikan pendidikan kejuruan perlu dilakukan agar para lulusan bisa segera dimanfaatkan bakatnya sesuai kebutuhan pengguna. Hal ini terlihat dalam statistik persekolahan SMK oleh Direktorat Pembinaan SMK, dimana perbandingan jumlah lulusan SMK dibandingkan dengan peluang kebutuhan tenaga kerja mencapai kurang lebih 4 juta.

Pendidikan kejuruan diselenggarakan berdasarkan pemikiran dan kenyataan bahwa tidak semua siswa dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi karena berbagai sebab, seperti keterbatasan biaya atau desakan ekonomi untuk segera bekerja dan terbatasnya daya tampung perguruan tinggi sehingga persaingan masuk perguruan tinggi sangat berat bagi siswa yang kemampuan akademiknya kurang (Nolker, 1983).

Gasskov (2000: 24) mengemukakan bahwa secara umum mekanisme pendanaan pendidikan kejuruan harus mencerminkan prinsip bahwa pendidikan atau pelatihan adalah suatu layanan dan peserta pendidikan atau pelatihan tersebut harus memikul biaya penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan keterampilan yang diharapkan dari pendidikan atau pelatihan kejuruan tersebut adalah untuk menghasilkan manfaat pribadi (private return) dan sosial (social return) yang positif. Manfaat pribadi dapat dilihat dari dampak (outcome) para lulusan SMK setelah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar daripada yang sedikit terdidik atau terlatih. Sedangkan manfaat sosial dari pendidikan ataupun pelatihan kejuruan akan dirasakan oleh anggota masyarakat lain yang berhubungan dengan akuisisi pengetahuan dan keterampilan lulusan dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan, secara umum diasumsikan memerlukan biaya yang lebih besar daripada bentuk pembelajaran lainnya (Klein, 2001: 4). Pernyataan tersebut tentunya didasarkan pada kajian secara teoritik maupun empiris sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Biaya pendidikan mereka merupakan porsi terbesar investasi nasional dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut

dikarenakan oleh adanya pembentukan skills-competencies melalui pembelajaran praktik lebih besar dibandingkan cognitive-competencies yang diberikan melalui teori. Penyelenggaraan pembelajaran praktik memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan pembelajaran teori, hal tersebut disebabkan oleh adanya biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan praktik, bahan praktik, perawatan peralatan praktik, bahan praktik, perawatan peralatan, gaji instruktur, dan untuk pembelian sumber energi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Gill (2008: 184) mengatakan bahwa rerata unit cost sekolah menengah kejuruan (SMK) 40% lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah menengah umum. Dari pernyataan tersebut tampak bahwa pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu penggunaan dana untuk pendidikan kejuruan perlu direncanakan secara matang dan sistematis berdasarkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan pembentukan kompetensi siswa yang ideal dan berkualitas untuk mencapai pendanaan yang efektif dan efisien.

Pengadaan tindakan analisis dana yang dikelola oleh lembaga pendidikan khususnya untuk sekolah sangat penting, baik dana yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumbangan orangtua siswa. Analisis dilakukan agar sekolah dapat mengetahui apakah ada pemborosan atau ketidaksesuaian dana yang diberikan dengan keadaan sekolah. Muljani (2011: 16) menyatakan bahwa analisis pembiayaan pendidikan merupakan salah satu alat yang potensial dan kompeten untuk membantu administrator pendidikan melihat secara lebih jelas berbagai alternatif dan “trade-offs” yang mungkin terjadi, serta untuk mengidentifikasi keuntungan dan kemungkinan pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Analisis biaya pendidikan pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mikro yang mendasarkan perhitungan biaya pada alokasi pengeluaran perkomponen pendidikan yang digunakan oleh siswa. Variabel penelitian ini lebih difokuskan pada komponen biaya satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi (personalia dan non personalia) dan biaya operasional (personalia dan non personalia). Dimana perencanaan biaya pendidikan harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dalam PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

SMK Negeri 4 Yogyakarta merupakan salah satu SMK yang berfokus pada bidang pariwisata, terbaik di Indonesia. Memiliki 7 (tujuh) paket keahlian yaitu, Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan, Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata, Paket Keahlian Tata Boga, Paket Keahlian Pateseri, Paket Keahlian Kecantikan Kulit, Paket Keahlian Kecantikan Rambut, dan Paket Keahlian Tata Busana. Dari 4 sumber dana yaitu dana APBN, dana APBD Provinsi D.I.Y, dana APBD Kota Yogyakarta, dan dana sumbangan masyarakat, SMK Negeri 4 Yogyakarta memiliki proporsi rencana pembiayaan pendidikan pada tahun ajaran 2016/2017 sumber dana paling besar berasal dari Dana APBD Kota Yogyakarta sebesar 56%, disusul dengan Dana Masyarakat sebesar 20,6%.

Pemerintah sendiri telah mengatur proporsi alokasi APBN dan APBD untuk pendidikan. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan”. Hal ini juga di dukung dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran mengalokasikan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah masing-masing untuk sektor pendidikan termasuk untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan”.

Dengan perkembangan manajemen dewasa ini, activity based costing (ABC) menjadi pilihan tepat sebagai metode untuk analisis biaya pendidikan. Metode *Activity Based Costing* (ABC) dapat mengendalikan biaya melalui penyediaan informasi tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya. Metode ini memiliki dasar pemikiran bahwa biaya ada penyebabnya, dan penyebab biaya dapat dikelola (Mulyadi, 2007). Deakin (1991: 41) mengatakan metode ABC memberikan analisis yang lebih menyeluruh mengenai apa yang mempengaruhi biaya dibandingkan *conventional costing methods*.

Metode ABC ini dipilih karena berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh metode analisis biaya yang lain. Beberapa keunggulan yang dimaksud diantaranya adalah kemampuan ABC menyediakan informasi yang berlimpah tentang aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi customer, kemampuan ABC menyediakan fasilitas untuk menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas (*activity based budget*), kemampuan ABC menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana pengurangan biaya, kemampuan ABC menyediakan secara akurat dan multidimensi biaya produk dan jasa yang dihasilkan.

Selain keuntungan diatas, metode ABC juga memberikan keuntungan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan aktifitas, perbaikan secara terus menerus untuk mengurangi biaya overhead dan memudahkan menentukan *relevant cost*. Dengan analisis biaya dengan metode *Activity Based Costing* ini diharapkan dapat ditentukan biaya satuan (*unit cost*) pelaksanaan pendidikan SMK di salah satu SMK Negeri di Provinsi DIY, yaitu SMK Negeri 4 Yogyakarta.

Masalah yang ada di SMK Negeri 4 Yogyakarta adalah walaupun transparansi telah dijalankan kepada orangtua siswa/masyarakat, namun hasil data transparansi tersebut belum mampu digunakan untuk pengolahan data perhitungan biaya untuk setiap kegiatan secara maksimal dikarenakan informasi data yang masih kurang. Sedangkan sumber dana kedua paling besar adalah dana masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang dapat mengalokasikan biaya overhead ke seluruh tingkat kelas, paket keahlian, hingga siswa per individu yaitu perhitungan dengan menggunakan model *Activity Based Costing*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu diadakan penelitian mengenai analisis *unit cost* berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Unit Cost Berdasarkan Model Activity Based Costing Siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017**.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan di SMK Negeri 4 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Sidikan 60 Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari sampai awal bulan Februari 2018. Subjek penelitian ini meliputi Bendahara Sekolah dan Kepala Bagian Tata Usaha dengan objek penelitian yaitu besarnya *unit cost* siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta per tingkat per paket keahlian di periode ajaran 2016/2017.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah perhitungan *unit cost* penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 4 Yogyakarta menggunakan *Activity Based Costing* (ABC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan identifikasi data Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 4 Yogyakarta dapat diketahui bahwa terdapat enam aktivitas yang dapat diklasifikasikan menjadi dua pusat aktivitas, yaitu aktivitas langsung dan aktivitas tidak langsung. Aktivitas langsung atau utama merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan siswa yang terdiri dari aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan. Aktivitas tidak langsung atau penunjang merupakan aktivitas yang secara tidak langsung menunjang keterlaksanaan dari aktivitas utama. Aktivitas penunjang di SMKN 4 Yogyakarta meliputi aktivitas pengembangan sekolah, aktivitas administrasi sekolah, aktivitas manajemen sekolah, dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana.

Enam aktivitas tersebut juga dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan aktivitas, yaitu *result-producing activities*, *result-contributing activities*, dan *support activities*. Aktivitas yang termasuk dalam *result-producing activities* adalah aktivitas belajar mengajar dan aktivitas kesiswaan yang merupakan aktivitas utama dan secara langsung berhubungan dengan siswa. Aktivitas yang termasuk dalam *result-contributing activities* adalah aktivitas pengelolaan sarana prasarana dan aktivitas manajemen sekolah karena kedua aktivitas tersebut secara langsung memberikan dukungan ke *result-producing activities*. Sedangkan aktivitas yang termasuk dalam *support activities* adalah aktivitas *support activities* adalah aktivitas pengembangan sekolah, dan aktivitas administrasi sekolah.

Pembebanan biaya yang dikeluarkan oleh sekolah berdasarkan data RKAS dilakukan dengan *direct tracing*, *driver tracing*, dan *allocation*. Penentuan cara pembebanan biaya dilakukan dengan mengidentifikasi apakah biaya termasuk biaya langsung atau tidak langsung. Biaya langsung atau biaya yang secara langsung dikeluarkan untuk membiayai aktivitas akan dibebankan secara *direct tracing*. Biaya tidak langsung atau biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas akan dibebankan secara *driver tracing* atau secara *allocation*.

Berdasarkan perhitungan pembebanan biaya ke aktivitas yang telah dilakukan, besarnya dana yang dialokasikan ke aktivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Pembebanan Biaya ke Aktivitas

No	Aktivitas		Jumlah Biaya	Presentase
1	Pengembangan Sekolah	Rp	1.236.917.067	6%
2	Administrasi Sekolah	Rp	1.555.221.637	7%
3	Manajemen Sekolah	Rp	1.044.974.351	5%
4	Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	2.986.635.877	14%
5	Belajar Mengajar	Rp	11.747.298.819	55%
6	Kesiswaan	Rp	2.736.097.500	13%
Jumlah Biaya Aktivitas		Rp	21.307.145.250	100%

Sumber: Data SMK Negeri 4 Yogyakarta yang telah diolah

Aktivitas belajar mengajar membutuhkan alokasi dana terbesar. Hal tersebut dikarenakan aktivitas belajar mengajar merupakan aktivitas paling utama di sekolah. Perbedaan

jumlah alokasi dana yang dikonsumsi aktivitas belajar sangat signifikan dibandingkan dengan aktivitas lain. Aktivitas manajemen sekolah mengonsumsi dana dengan presentase terkecil. Hal tersebut berarti manajemen sekolah tidak membutuhkan banyak dana.

Biaya yang telah dibebankan ke aktivitas dan antar-aktivitas selanjutnya diidentifikasi sesuai dengan karakteristiknya, kemudian biaya yang memiliki kesamaan *driver* dikelompokkan dalam *activity cost pool*. Untuk mempermudah perhitungan *unit cost* pendidikan per tingkat per paket keahlian, maka perlu dihitung terlebih dahulu tarif *cost driver*nya. Berikut ini data perhitungan tarif *cost driver* untuk setiap *cost pool*.

Tabel 2. Penentuan *Cost Driver*

No	Aktivitas	Jumlah Biaya	<i>Driver</i>	<i>Act. Driver</i>	<i>Cost Driver</i>
Aktivitas Belajar Mengajar					
1	ACPKBM antar Paket Keahlian	Rp 2.231.271.000	prorata paket Keahlian	7	Rp 318.753.000
2	ACP KBM antar Rombel	Rp 25.045.000	jumlah rombel	53	Rp 472.547
3	ACP KBM Seluruh Siswa	Rp 651.351.250	jumlah siswa	1601	Rp 406.840
4	ACP Khusus Kelas X	Rp 547.200.000	jumlah siswa kelas X	569	Rp 961.687
5	ACP Khusus Kelas X dan XI	Rp 89.249.200	jumlah siswa kelas X dan XI	1106	Rp 80.695
6	ACP Khusus Kelas XI	Rp 234.079.000	jumlah siswa kelas XI	537	Rp 435.901
7	ACP Khusus Kelas XII	Rp 393.752.000	jumlah siswa kelas XII	495	Rp 795.459
8	ACP KBM Berdasarkan Jam Pelajaran	Rp 12.354.259.291	jumlah jam pelajaran	89132	Rp 138.606
Aktivitas Kesiswaan					
1	ACP Kesiswaan Seluruh Siswa	Rp 3.887.180.259	jumlah siswa	1601	Rp 2.427.970
2	ACP Kesiswaan Khusus Kelas X	Rp 154.467.000	jumlah siswa kelas X	569	Rp 271.471
3	ACP Kesiswaan Khusus Kelas X dan XI	Rp 466.718.000	jumlah siswa kelas X dan XI	1106	Rp 421.987
4	ACP Kesiswaan Khusus Kelas XI dan XII	Rp 124.485.000	jumlah siswa kelas XI dan XII	1032	Rp 120.625
5	ACP Kesiswaan Khusus kelas XII	Rp 148.088.250	jumlah siswa kelas XII	495	Rp 299.168

Sumber: Data SMK Negeri 4 Yogyakarta yang telah diolah

Setelah dilakukan perhitungan *cost driver*, langkah selanjutnya adalah menghitung *activity driver rate* per tingkat per paket keahlian. Rumus untuk menghitung *activity driver rate* adalah sebagai berikut: $Activity\ Driver\ Rate = Cost\ Driver \times Activity\ Driver$. Jumlah dari *activity driver*

rate untuk masing-masing tingkat dan paket keahlian selanjutnya digunakan untuk menghitung *unit cost* pendidikan per tingkat per paket keahlian per tahun dan per bulan dengan cara membagi total *activity driver rate* dengan jumlah siswa masing-masing tingkat dan paket keahlian.

Berdasarkan perhitungan biaya untuk setiap paket keahlian dalam satu tahun alokasi dana untuk Paket Keahlian Akomodasi Perhotelan Rp2.487.365.291, Paket Keahlian Usaha Perjalanan Wisata Rp2.483.159.186, Paket Keahlian Tata Boga Rp4.674.197.997, Paket Keahlian Pateseri Rp2.168.117.266, Paket Keahlian Kecantikan Kulit Rp2.454.600.247, Paket Keahlian Kecantikan Rambut Rp2.391.359.678, dan Paket Keahlian Tata Busana Rp4.648.345.585. Alokasi dana per kompetensi keahlian tersebut kemudian menghasilkan Biaya Satuan Pendidikan per siswa per tingkat per kompetensi keahlian baik untuk setiap tahun maupun setiap bulan. Rincian biaya satuan (*unit cost*) pendidikan per siswa per tingkat per paket keahlian baik untuk setiap tahun maupun setiap bulan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Biaya Satuan (*Unit Cost*) Siswa per Tahun

No	Paket Keahlian	Tingkat		
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1	Akomodasi Perhotelan	Rp14.146.151	Rp14.285.825	Rp11.842.938
2	Usaha Perjalanan Wisata	Rp13.525.955	Rp14.118.215	Rp12.111.658
3	Tata Boga	Rp13.525.955	Rp13.186.414	Rp10.681.215
4	Pateseri	Rp14.455.038	Rp14.459.022	Rp13.943.572
5	Kecantikan Kulit	Rp14.298.143	Rp14.459.022	Rp12.708.813
6	Kecantikan Rambut	Rp14.298.143	Rp16.572.022	Rp13.791.157
7	Tata Busana	Rp13.316.065	Rp13.654.938	Rp10.900.427

Sumber: Data SMK Negeri 4 yang telah diolah

Berikut rincian biaya satuan (*unit cost*) pendidikan per siswa per tingkat per paket keahlian per bulan:

Tabel 4. Rekapitulasi Biaya Satuan (*Unit Cost*) Siswa per Bulan

No	Paket Keahlian	Tingkat		
		Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
1	Akomodasi Perhotelan	Rp 1.178.846	Rp 1.190.485	Rp 986.912
2	Usaha Perjalanan Wisata	Rp 1.178.846	Rp 1.176.518	Rp 1.009.305
3	Tata Boga	Rp 1.127.163	Rp 1.098.868	Rp 890.101
4	Pateseri	Rp 1.204.587	Rp 1.204.918	Rp 1.161.964
5	Kecantikan Kulit	Rp 1.191.512	Rp 1.204.918	Rp 1.059.068
6	Kecantikan Rambut	Rp 1.191.512	Rp 1.381.002	Rp 1.149.263
7	Tata Busana	Rp 1.109.672	Rp 1.137.911	Rp 908.369

Sumber: Data SMK Negeri 4 yang telah diolah

Berdasarkan perhitungan *Unit Cost* Pendidikan dengan *Activity Based Costing*, dapat diketahui bahwa antartingkat dan paket keahlian memiliki *Unit Cost* yang berbeda, padahal besarnya iuran pendidikan per siswa ditetapkan sama. Rata-rata *unit cost* tertinggi terdapat pada paket keahlian Kecantikan Rambut, penyebabnya adalah terdapat biaya pengadaan kelengkapan

KBM, pemeliharaan peralatan KBM, serta pemakaian tenaga listrik yang relatif besar dibandingkan dari paket keahlian lainnya.

SMK Negeri 4 Yogyakarta selama ini menggunakan perhitungan *Unit Cost* Pendidikan secara tradisional, yaitu dengan membebankan biaya prorata kepada semua siswa. Perhitungan biaya ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya kemudian dibagi dengan jumlah siswa. Perhitungan *unit cost* pendidikan secara tradisional adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Biaya Satuan (Unit Cost) Per Tahun} &= \frac{\text{JumlahBiaya}}{\text{JumlahSiswa}} \\ &= \frac{\text{Rp}20.315.649.050}{1601} = \text{Rp}12.689.350 \end{aligned}$$

$$\text{Biaya Satuan (Unit Cost) Per Bulan} = \text{Rp}12.689.350 / 12 = \text{Rp}1.057.446$$

Berikut ini adalah selisih perhitungan *Unit Cost* menggunakan *Activity Based Costing* dan perhitungan tradisional yang dilakukan sekolah:

Tabel 5. Selisih *Unit Cost* Per Bulan yang Dihitung Menggunakan *Activity Based Costing* dan Tradisional

Paket Keahlian	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII
Akomodasi Perhotelan	Rp 121.400	Rp 133.040	Rp (70.534)
Usaha Perjalanan Wisata	Rp 121.400	Rp 119.072	Rp (48.141)
Tata Boga	Rp 69.717	Rp 41.422	Rp(167.345)
Pateseri	Rp 147.141	Rp 147.473	Rp 104.518
Kecantikan Kulit	Rp 134.066	Rp 147.473	Rp 1.622
Kecantikan Rambut	Rp 134.066	Rp 323.556	Rp 91.817
Tata Busana	Rp 52.226	Rp 80.466	Rp(149.077)

Sumber: Data SMK Negeri 4 yang telah diolah

Dari tabel di atas terlihat adanya perbedaan dimana sebagian besar hasil perhitungan biaya satuan pendidikan yang dihitung dengan *Activity Based Costing* berjumlah lebih besar daripada hasil yang dihitung dengan menggunakan metode tradisional. Hal ini disebabkan karena dengan metode tradisional, biaya *overhead* dialokasikan langsung pada jumlah siswa walaupun sebenarnya tidak semua biaya dapat dialokasikan langsung ke jumlah siswa.

Hasil perhitungan antara metode tradisional dan ABC dapat dibandingkan menjadi dua kategori, yaitu *undercosted* dan *overcosted* (Horngren, Datar & Foster, 2008: 161). *Undercosted* artinya hasil perhitungan menggunakan metode tradisional lebih rendah daripada hasil perhitungan menggunakan metode *Activity Based Costing*. *Overcosted* adalah hasil perhitungan menggunakan metode tradisional lebih tinggi daripada hasil perhitungan menggunakan metode *Activity Based Costing*. Selisih positif pada tabel 5 menunjukkan terjadinya *undercosting*, sedangkan selisih negatif menunjukkan *overcosting*. Penerapan ABC dinilai lebih akurat karena pada dasarnya biaya pada suatu aktivitas memiliki karakteristik masing-masing, sehingga pembebanannya tidak dapat disamaratakan.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktivitas-aktivitas yang dapat diidentifikasi di SMK Negeri 4 Yogyakarta meliputi aktivitas belajar mengajar, aktivitas kesiswaan, aktivitas pengembangan sekolah, aktivitas administrasi sekolah, aktivitas manajemen sekolah dan aktivitas pengelolaan sarana prasarana. Dari 6 aktivitas sekolah yang diidentifikasi, aktivitas belajar mengajar memperoleh porsi paling besar yaitu sebesar 55% disusul dengan aktivitas pengelolaan sarana prasarana dan yang paling kecil adalah aktivitas manajemen sekolah sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sekolah masih berfokus pada kegiatan belajar mengajar.
2. Pembebanan biaya antar-aktivitas dilakukan dengan dua cara yaitu *driver tracing* dan *allocation*.
3. Pengelompokan biaya ke dalam *activity cost pool* yang memiliki *driver* yang sama setelah seluruh biaya terkumpul secara keseluruhan, bertujuan untuk mempermudah penghitungan biaya.
4. *Unit cost* per siswa di setiap paket keahlian dan per kelas berbeda-beda. Faktor penentunya umumnya disebabkan karena jumlah siswa yang ada di masing-masing kelas dan paket keahlian. Besarnya *unit cost* per siswa per paket keahlian per bulan berkisar dalam rentang Rp890.101 sampai Rp1.381.002 dari 7 paket keahlian di SMK Negeri 4 Yogyakarta.
5. *Unit cost* dihitung dengan model ABC dibandingkan dengan *unit cost* dihitung secara tradisional umumnya juga berbeda. Perbedaannya dalam arah yang tidak sama. Ada yang *overcosted* (*unit cost* ABC lebih rendah dari *unit cost* tradisional), ada yang *undercosted* (*unit cost* ABC lebih tinggi dari *unit cost* tradisional). Hal ini menggambarkan bahwa penetapan *unit cost* secara tradisional adalah dipukul rata, mengakibatkan pembebanan biaya kegiatan-kegiatan dari paket keahlian tertentu yang sebagian atau seluruhnya tidak dilakukan kegiatannya oleh paket keahlian lainnya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi SMK Negeri 4 Yogyakarta dijadikan alternatif bagi sekolah selaku penyelenggara pendidikan dalam penentuan besarnya biaya satuan (*unit cost*) pendidikan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan kajian dalam menentukan besar dan bantuan pendidikan atau Biaya Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa antar tingkat dan paket keahlian. Pemerintah diharapkan dapat memberikan standar pengelolaan dana, sehingga dana tersebut dapat dialokasikan secara tepat sesuai kebutuhan masing-masing tingkat dan paket keahlian.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memiliki informasi dari administrasi sekolah berupa konsumsi *reel* agar dapat melakukan perhitungan yang lebih menyeluruh, melakukan perhitungan bahan praktek, peralatan, dan media pembelajaran sesuai dengan masa kebermanfaatannya, ataupun dapat melakukan penelahan lebih mendalam mengenai *driver* yang digunakan pada kegiatan manajemen sekolah dan kegiatan administrasi sekolah sehingga tidak dihitung menggunakan basis asumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Charles T Horngren., Datar M,Srikant., dan Foster,George. (2008). *Akuntansi Biaya*. Edisi 11. PT. Macanan Jaya Cemerlang: Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. (2002). *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif*. Jakarta.
- Edward B. Deakin, Michael W. Maher (1991). *Cost Accounting, 3rd edition*. Homewood, IL: Irwin.
- Gasskov, V.(2000). *Managing Vocational Training Systems: a handbook for senior administrators*. Switzerland: International Labour Office
- Gill, I. S., Fluitman, F., & Dar, A. (2008). *Vocational Education and Training Reform*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Kemenkeu. (2016). *Salinan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan*.
- Klein, S. (2001). *Financing Vocational Education: A State Policymaker's Guide*. Sorting out the byzantine world of state funding formulas, district cost variation, and option for supporting the provision of equitable, quality vocational education in high schools. (Instructional Resource No. 30). Athens, GA and College Park, MD: Educational Resources Information Center (ERIC Document Reproduction Service No. ED457329).
- Muljani A. Nurhadi. (2011). *Dilema Kebijakan Pendanaan Pendidikan*. Yogyakarta: Nurhadi Center.
- Mulyadi. (2007). *Activity-Based Cost System: Sistem Informasi Biaya untuk Pemberdayaan Karyawan, Pengurangan Biaya, dan Penentuan Secara Akurat Kos Produk dan Jasa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mubyarto.(1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Nolker, Helmut, (1983). *The Economic Cost of Education*, Terjemahan. Jakarta: Gramedia.